

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL LAPORAN NUSANTARA

OKTOBER 2025



Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional

LAPORAN
NUSANTARA

OKTOBER 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
PRAKATA	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
BAGIAN I Perkembangan Terkini dan Prospek Pertumbuhan Ekonomi Daerah	3
BAGIAN II Perkembangan Terkini dan Prospek Inflasi Daerah	9
BAGIAN III Perkembangan Terkini Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah	11
BAGIAN IV Isu Strategis: Penguatan Ekosistem dan Perluasan Akseptasi Pembayaran Digital Untuk Mendukung Pertumbuhan Sektor Prioritas dan Program Pemerintah	13
BOKS 1 Kesiapan Infrastruktur dan Adopsi Pembayaran Digital Spasial	19

Prakata

Laporan Nusantara merupakan laporan yang menyampaikan gambaran kondisi terkini dan prospek perekonomian nasional dalam perspektif spasial. Asesmen perekonomian spasial didasarkan pada perkembangan perekonomian di lima wilayah, yakni Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali-Nusa Tenggara (Balinusra), dan Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua). Laporan ini dipublikasikan secara triwulanan oleh Bank Indonesia pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober. Publikasi Laporan Nusantara edisi ini secara khusus mengangkat isu strategis mengenai “Penguatan Ekosistem dan Perluasan Akseptasi Pembayaran Digital untuk Mendukung Pertumbuhan Sektor Prioritas dan Program Pemerintah”. Isu ini menjadi penting didalami sejalan dengan prospek perekonomian dunia yang diliputi oleh ketidakpastian sehingga pada gilirannya dapat memengaruhi perekonomian daerah. Penguatan peran digitalisasi akan mendukung peningkatan efisiensi perekonomian dan pengendalian inflasi di daerah. Kami berharap buku Laporan Nusantara ini dapat memberikan manfaat dan masukan bagi para pemangku kepentingan dan pemerhati ekonomi daerah. Semangat optimisme direfleksikan melalui desain Burung Garuda gedung Kompleks Perkantoran Bank Indonesia Ibu Kota Nusantara (Koperbi IKN) yang merepresentasikan semangat untuk bangkit. Kami berharap Bank Indonesia dapat senantiasa mendukung pertumbuhan ekonomi di seluruh Nusantara. Harapan tersebut sebagaimana kami visualisasikan pada peta Nusantara, dengan sentuhan motif batik Tangkawang Ampiek yang bermakna rizki dan kesehatan untuk mencapai kemakmuran bangsa.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter



Firman Mochtar
Direktur Eksekutif

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

Ringkasan Eksekutif

Pertumbuhan ekonomi daerah pada triwulan III 2025 diperkirakan tetap kuat di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Dari sisi domestik, aktivitas ekonomi di berbagai wilayah tetap terjaga didukung perbaikan investasi dan akselerasi belanja pemerintah di daerah. Investasi Jawa tumbuh paling tinggi, terutama didorong investasi industri di Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta akselerasi belanja modal pemerintah. Dari sisi eksternal, ekspor terutama ditopang komoditas utama masing-masing wilayah, yakni logam mulia Jawa, *Crude Palm Oil* (CPO) di Sumatera, besi baja Sulampua, serta perbaikan kontraksi batu bara Kalimantan. Dari sisi lapangan usaha (LU), kinerja LU Industri membaik di wilayah barat, sementara wilayah timur tetap tumbuh tinggi ditopang industri hilirisasi. LU primer membaik terutama LU Pertanian, sementara LU Pertambangan di wilayah timur melambat karena kendala produksi. Perbaikan investasi terkonfirmasi dari peningkatan kinerja LU Konstruksi di mayoritas wilayah.

Perekonomian daerah sepanjang 2025 diperkirakan tetap tumbuh solid, dan perlu terus didorong. Aktivitas investasi menjadi penopang utama pertumbuhan, seiring berlanjutnya ekspansi proyek besar di berbagai wilayah, antara lain industri petrokimia, otomotif, dan elektronik di Jawa, serta hilirisasi logam dasar di Sulampua, Balinusra, dan Kalimantan. Selain investasi, dukungan fiskal daerah juga menopang pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya pada semester II. Peningkatan investasi tersebut memperkuat kinerja industri pengolahan di seluruh wilayah. Selain LU Industri, kinerja LU Pertanian di berbagai wilayah juga menunjukkan perbaikan, terutama didorong program swasembada pangan pemerintah, serta kondisi cuaca yang mendukung.

Inflasi IHK gabungan kota di seluruh wilayah pada triwulan III 2025 terkendali. Inflasi inti terjaga rendah sejalan dengan terjaganya ekspektasi inflasi dan normalisasi permintaan domestik pascaRamadan dan Idulfitri. Inflasi kelompok *volatile food* (VF) terkendali di bawah target 5%, meski meningkat dibandingkan realisasi triwulan sebelumnya. Perkembangan ini terutama dipengaruhi kenaikan harga komoditas hortikultura akibat faktor cuaca kemarau basah yang berdampak pada penurunan produksi. Sementara itu,

inflasi kelompok *administered prices* (AP) meningkat terutama dipengaruhi kenaikan harga rokok dan tarif air minum. Secara provinsi, inflasi di mayoritas provinsi masih dalam rentang sasaran dengan inflasi tertinggi terjadi di Papua Selatan sebesar 3,00% (yoy), sedangkan deflasi terbesar terjadi di Papua Barat sebesar 0,67% (yoy).

Inflasi IHK 2025 di seluruh wilayah diperkirakan tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5±1%. Dari sisi domestik, tekanan inflasi inti terkendali didukung konsistensi kebijakan moneter Bank Indonesia, ekspektasi inflasi yang terjaga, dampak *imported inflation* dan rambatan VF yang terkendali, serta efek positif dari digitalisasi. Dinamika inflasi sepanjang 2025 terutama dipengaruhi tekanan inflasi kelompok *volatile food* (VF). Tekanan inflasi VF terutama disumbang oleh komoditas hortikultura, di tengah pasokan beras yang lebih baik, sejalan dengan keberhasilan program pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan. Pengendalian inflasi ke depan diarahkan untuk mempertahankan inflasi berada di kisaran sasaran. Sinergi melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID), termasuk melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) akan terus diperkuat untuk memastikan distribusi pasokan antara daerah sentra ke daerah nonsentra.

Ke depan, pertumbuhan ekonomi domestik perlu terus diakselerasi. Bauran kebijakan Bank Indonesia diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas. Bank Indonesia melalui 46 Kantor Perwakilan di daerah terus bersinergi dengan Pemerintah Daerah guna mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah. Implementasi program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), serta perluasan akseptasi dan pengembangan ekosistem digital semakin dioptimalkan. Digitalisasi yang berkembang pesat secara nasional dan di daerah akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan terjaganya tekanan inflasi. Secara khusus, pada Laporan Nusantara ini akan mengulas strategi penguatan digitalisasi pada sistem pembayaran. Pembahasan tersebut secara lengkap akan disampaikan pada Bagian IV Isu Strategis: *Penguatan Ekosistem dan Perluasan Akseptasi Pembayaran Digital untuk Mendukung Pertumbuhan Sektor Prioritas dan Program Pemerintah.*

"Halaman ini sengaja dikosongkan"

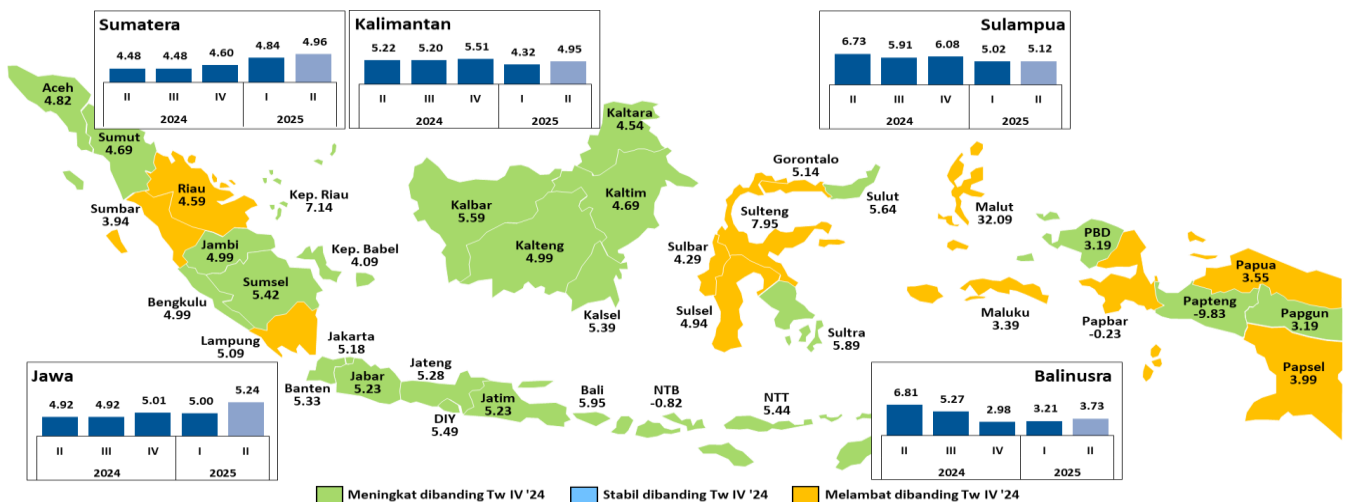
BAGIAN 1

Perkembangan Terkini dan Prospek Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Kinerja ekonomi daerah triwulan III 2025 diperkirakan tetap terjaga kuat, ditopang perbaikan pertumbuhan di mayoritas wilayah. Kinerja ekonomi daerah pada triwulan III terutama ditopang oleh perbaikan investasi, khususnya dari proyek-proyek strategis dan ekspansi industri di KI dan KEK, serta dibarengi akselerasi proyek pemerintah. Dari sisi eksternal, ekspor nonmigas triwulan III 2025 hingga Agustus tetap positif di mayoritas wilayah, didorong Sumatera, Jawa, dan Sulampua. Dari sisi lapangan usaha, perbaikan investasi terkonfirmasi pada peningkatan kinerja LU Konstruksi. Investasi di KI juga tecermin dari peningkatan kinerja LU Industri di wilayah barat dan tingginya pertumbuhan LU Industri di wilayah timur. Sementara itu, LU Pertanian di Sumatera, Jawa, dan Sulampua juga meningkat seiring panen gadu dan peningkatan produksi perkebunan.

Perekonomian daerah secara keseluruhan 2025 diperkirakan meningkat dibandingkan kinerja 2024. Perbaikan ekonomi daerah, terutama ditopang ekonomi di wilayah barat, khususnya Jawa dan Sumatera, sementara ekonomi di wilayah timur tumbuh terbatas, terutama di Sulampua. Dari sisi domestik, dorongan utama wilayah barat terutama ditopang kinerja investasi, di tengah konsumsi RT yang tumbuh lebih terbatas. Topangan investasi tertinggi di Jawa yang merupakan wilayah sentra pengembangan KI. Sementara itu, terbatasnya perbaikan kinerja di wilayah timur terutama dipengaruhi kinerja eksternal akibat permintaan negara mitra dagang dan kendala produksi pada LU Pertambangan. Dukungan fiskal daerah secara keseluruhan 2025 diperkirakan lebih terbatas, meski terakselerasi pada semester II 2025.



Sumber: BPS, diolah.

Gambar I.1. Peta Pertumbuhan Ekonomi Regional Triwulan II 2025

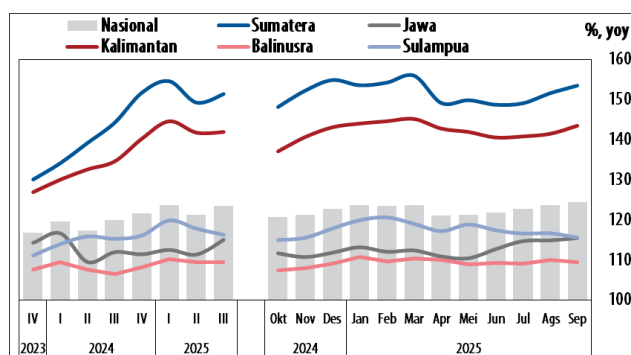
Konsumsi Swasta

Konsumsi swasta diperkirakan tetap terjaga pada triwulan III 2025. Pertumbuhan ditopang oleh masih kuatnya konsumsi rumah tangga (RT), di tengah terbatasnya pertumbuhan konsumsi LNPRT seiring berlalunya aktivitas keagamaan di Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Konsumsi RT triwulan III 2025 didukung oleh perbaikan pendapatan masyarakat dan penyaluran berbagai stimulus fiskal, termasuk Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan program bantuan

sosial. Di wilayah Sumatera dan Kalimantan, ketahanan daya beli masyarakat dipengaruhi oleh tingginya pendapatan pekerja perkebunan kelapa sawit sejalan dengan kenaikan harga Tandan Buah Segar (TBS), sebagaimana tecermin dari indeks Nilai Tukar Petani (Grafik I.1). Lebih lanjut, realisasi stimulus fiskal diperkirakan turut mendorong perbaikan daya beli masyarakat di berbagai wilayah.

Prospek konsumsi swasta keseluruhan tahun 2025 diperkirakan tetap tumbuh tinggi, meski tidak sekuat

capaian tahun sebelumnya. Pertumbuhan konsumsi swasta tertahan akibat konsumsi LNPRT seiring normalisasi belanja Pemilu. Meskipun demikian, konsumsi rumah tangga (RT) diperkirakan tetap meningkat, terutama di Sumatera, Balinusra, dan Kalimantan. Perbaikan tersebut didorong oleh kenaikan pendapatan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta penyesuaian Upah Minimum Provinsi (UMP) yang meningkatkan daya beli masyarakat. Sementara itu, konsumsi RT di Jawa dan Sulampua relatif stabil sejalan dengan pertumbuhan pendapatan riil dan ekspektasi konsumen yang lebih terbatas. Secara keseluruhan, konsumsi swasta tetap menjadi penopang pertumbuhan ekonomi, meskipun lebih moderat dibandingkan kondisi tahun sebelumnya.



Sumber: BPS, diolah

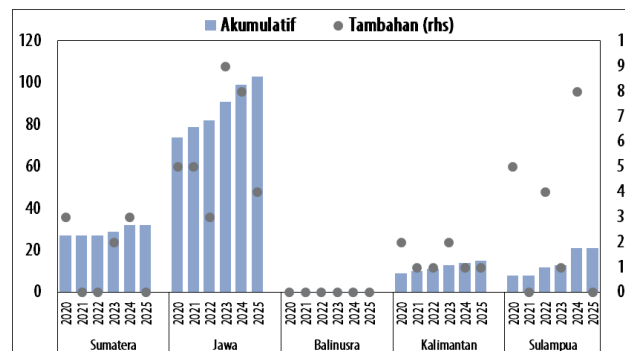
Grafik I.1. Nilai Tukar Petani

Investasi

Kinerja investasi daerah triwulan III 2025 diperkirakan meningkat di mayoritas wilayah, tertinggi di Jawa. Perbaikan investasi daerah didorong oleh prospek positif pengembangan KI/KEK di seluruh wilayah (Grafik I.2). Pengembangan KI/KEK yang dibarengi akselerasi proyek pemerintah mendorong prospek investasi Jawa dan Sumatera pada triwulan III 2025. Sementara itu, berlanjutnya pembangunan IKN pascapembukaan blokir anggaran pemerintah dan program 3 juta rumah di Kalimantan turut berkontribusi pada kenaikan kinerja investasi di wilayah tersebut. Di Balinusra, realisasi proyek swasta dan pemerintah, termasuk KEK, juga menopang prospek investasi triwulan III. Investasi di Sulampua masih didorong oleh proyek hilirisasi mineral, meski pada triwulan III relatif terbatas.

Secara keseluruhan 2025, investasi daerah diperkirakan tetap tumbuh positif ditopang Jawa dan Sulampua. Sejalan dengan posisinya sebagai episentrum kawasan industri di Indonesia, pembangunan KI/KEK yang masif di Jawa mendorong prospek investasi di wilayah tersebut. Sementara itu, proyek swasta di sektor hilirisasi mineral dan migas menopang prospek investasi

Sulampua pada 2025. Investasi Sumatera pada semester II 2025 diperkirakan tumbuh lebih tinggi didorong investasi KI/KEK dan akselerasi proyek pemerintah pascapembukaan blokir anggaran. Sejalan dengan Sumatera, investasi di Balinusra diperkirakan tetap kuat didorong peningkatan jumlah proyek investasi, meskipun tertahan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pada awal tahun. Kebijakan efisiensi juga berdampak pada terbatasnya realisasi pembangunan IKN sehingga menahan pertumbuhan investasi Kalimantan pada 2025.



Sumber: Kemenperin, diolah

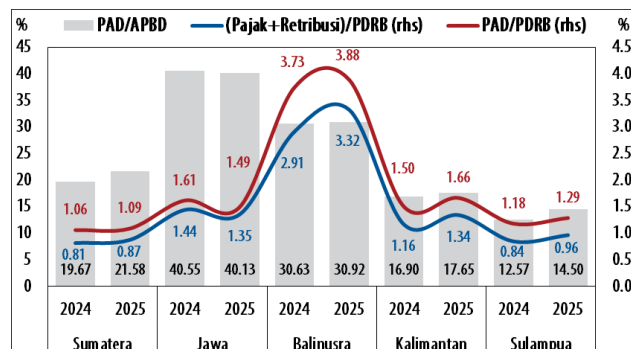
Grafik I.2. Pertumbuhan Jumlah Kawasan Industri Wilayah

Konsumsi Pemerintah – Fiskal Daerah

Dorongan belanja pemerintah pada triwulan III 2025 membaik di seluruh wilayah. Perbaikan realisasi belanja dipengaruhi kebijakan relaksasi belanja dan penetapan APBD-P di mayoritas daerah. Realisasi belanja Pemerintah Daerah pada triwulan III 2025 diperkirakan meningkat dibandingkan capaian triwulan sebelumnya, terutama di Jawa, Balinusra, dan Sulampua. Dari sisi komponen, perbaikan realisasi didorong oleh belanja pegawai dan barang/jasa seiring kenaikan gaji ASN sebesar 8% sejak Agustus 2025, penyaluran beberapa tunjangan lainnya, serta akselerasi belanja program prioritas pemerintah. Perbaikan realisasi belanja juga turut ditopang peningkatan pendapatan Pemda, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hingga Agustus 2025, peningkatan PAD didorong perbaikan pendapatan pajak dan retribusi di mayoritas wilayah (Grafik I.3). Lebih lanjut, kebijakan relaksasi belanja Pemerintah Daerah sejak triwulan II 2025 dan penyesuaian APBD-P yang diperkirakan selesai pada triwulan III 2025 turut mendorong konsumsi pemerintah lebih tinggi di berbagai daerah.

Pada keseluruhan 2025, dukungan konsumsi Pemerintah dalam perekonomian daerah tetap positif, meski tidak sekuat tahun sebelumnya. Realisasi fiskal daerah pada keseluruhan tahun 2025 diperkirakan tidak setinggi tahun 2024 dipengaruhi normalisasi

pascaPemilu dan Pilkada tahun sebelumnya. Lebih lanjut, proses administratif realokasi anggaran dana transfer pada awal tahun, penetapan APBD yang lebih lambat, serta kebijakan pergeseran komposisi belanja untuk mendukung program prioritas oleh Pemda menahan kecepatan realisasi khususnya pada paruh pertama 2025. Khusus di Kalimantan, konsumsi pemerintah diperkirakan terkontraksi dibandingkan kinerja tahun sebelumnya disebabkan penurunan belanja Pemerintah dalam rangka pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun berjalan.



Sumber: Kemenkeu, diolah

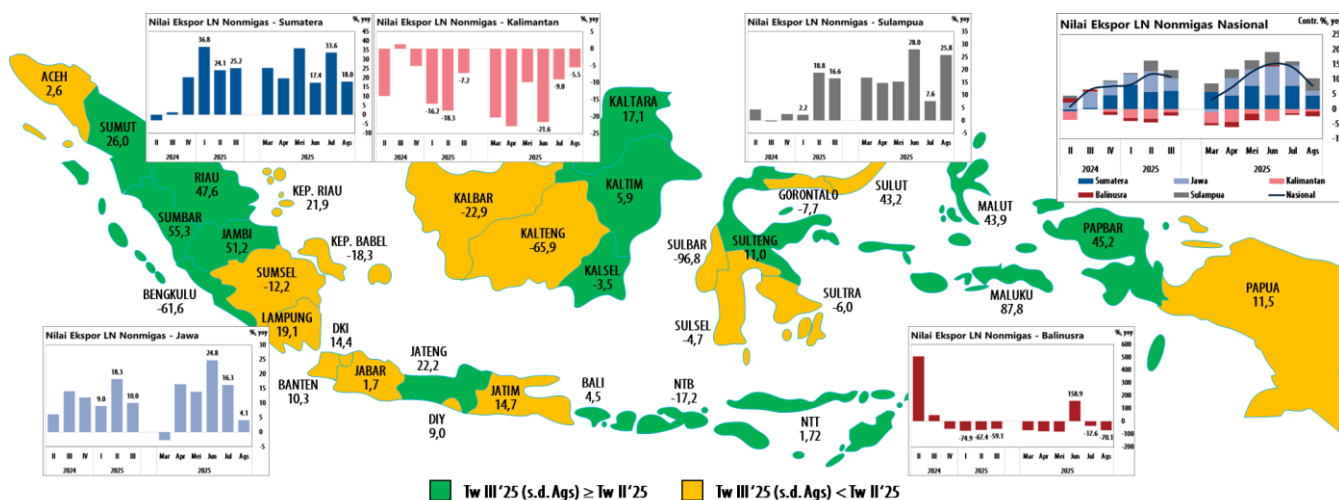
Grafik 1.3. Perkembangan Pangsa PAD terhadap Pendapatan Total APBD dan Rasio PAD terhadap PDRB s.d Agustus 2025

Ekspor Luar Negeri

Ekspor nonmigas triwulan III 2025 hingga Agustus tetap tumbuh positif di mayoritas wilayah, didorong Sumatera, Jawa, dan Sulampua (Gambar 1.2). Ekspor Jawa yang tumbuh positif terutama ditopang peningkatan permintaan emas global sebagai *safe haven asset*. Perbaikan ekspor emas Jawa juga sejalan dengan kenaikan harga dan produksi *smelter* di Gresik. Sementara itu, kinerja ekspor Sumatera meningkat ditopang peningkatan ekspor CPO ke India seiring periode perayaan Diwali, yang diimbangi dengan

perbaikan produksi. Kinerja ekspor Sulampua tumbuh positif didorong komoditas nikel dan turunannya, antara lain *nickel pig iron* (NPI) dan besi baja. Perbaikan tersebut dipengaruhi oleh masih tingginya permintaan dari negara mitra, terutama Tiongkok, yang meningkat dibandingkan kondisi triwulan sebelumnya. Di sisi lain, perbaikan kontraksi ekspor Kalimantan pada triwulan III didorong permintaan batu bara dari Asia Timur dan ASEAN. Produksi batu bara korporasi juga meningkat untuk memenuhi target Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) hingga akhir tahun. Ekspor Balinusra masih terkontraksi akibat penurunan ekspor konsentrat tembaga. Namun, kontraksi lebih dalam tertahan oleh mulai beroperasinya *smelter* tembaga yang mendorong pertumbuhan positif ekspor olahan tembaga.

Prospek ekspor nonmigas pada 2025 tetap kuat ditopang peningkatan di mayoritas wilayah, kecuali Sulampua. Peningkatan permintaan emas yang diiringi prospek kenaikan harga dan produksi diperkirakan tetap mendorong ekspor Jawa pada keseluruhan tahun 2025. Ekspor Sumatera diperkirakan meningkat didorong oleh permintaan CPO Tiongkok dan India yang diperkirakan tetap tinggi dan tren peningkatan harga CPO global, didukung pemulihan produksi TBS. Ekspor Kalimantan juga diperkirakan meningkat pada keseluruhan 2025, didorong oleh ekspor CPO dan alumina. Di sisi lain, prospek ekspor Balinusra diperkirakan tertahan akibat penurunan ekspor konsentrat tembaga di tengah peningkatan kapasitas *smelter* yang berlangsung secara gradual. Selain itu, produksi tambang tembaga juga masih berada pada fase awal dengan kualitas bijih yang belum optimal. Ekspor Sulampua juga diperkirakan tertahan akibat penurunan ekspor pertambangan, seiring berakhirnya izin ekspor konsentrat tembaga serta kendala produksi di Papua.



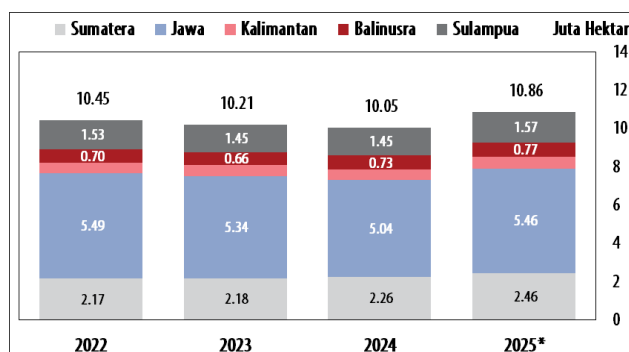
Sumber: Bea Cukai, diolah (data triwulan III 2025 s.d. Agustus 2025)

Gambar 1.2. Peta Pertumbuhan Ekspor Nonmigas Daerah Triwulan III 2025 (%yoy)

LU Pertanian

Kinerja LU Pertanian triwulan III 2025 diperkirakan meningkat didukung berlangsungnya panen gadu dan peningkatan panen perkebunan. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) luas panen gadu padi pada Juli–September 2025 diperkirakan mencapai 3,07 juta hektare, naik 11,33 persen dibandingkan produksi periode yang sama tahun lalu. Dari sisi tanaman perkebunan, produksi sawit meningkat pada triwulan III 2025, khususnya di Sumatera didukung aktivitas pemupukan yang optimal pada tahun 2024. Namun produksi hortikultura, khususnya bawang merah dan cabai merah, diperkirakan melambat pada triwulan III 2025. Hal ini disebabkan gangguan produksi akibat hama di Sumatera dan Jawa, serta kondisi cuaca kemarau basah yang berlangsung sejak Mei 2025.

Secara keseluruhan tahun 2025, LU Pertanian diperkirakan tumbuh lebih baik dibandingkan kinerja tahun sebelumnya. Cuaca yang lebih kondusif dan dukungan program pemerintah menjadi pendorong perbaikan sepanjang 2025. Produksi komoditas tanaman pangan, khususnya padi di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulampua diperkirakan lebih tinggi dibandingkan kondisi tahun 2024. Upaya peningkatan produksi padi ditempuh melalui berbagai program, antara lain perluasan areal tanam (Grafik I.4), optimasi lahan, hingga cetak sawah baru. Dari sisi input produksi, dukungan penggunaan benih unggul bermutu, pemupukan berimbang, irigasi pertanian, serta mekanisasi prapanen dan pascapanen, mendukung perbaikan produksi 2025. Produksi TBS juga diperkirakan meningkat pada tahun 2025 didorong oleh program peremajaan sawit yang terus diperluas, terutama di Sumatera dan Kalimantan, peningkatan konsumsi domestik sejalan dengan implementasi program B40, dan permintaan eksternal, terutama dari India.

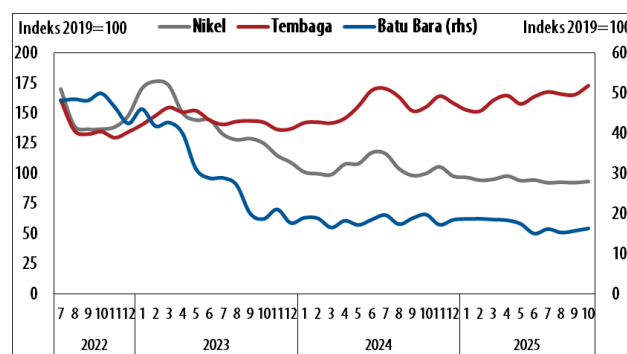


Sumber: BPS, diolah

Grafik I.4. Perkembangan Produktivitas Lahan Padi

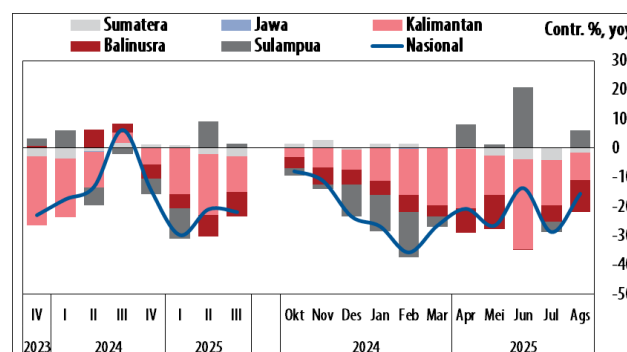
LU Pertambangan

Pada triwulan III 2025, kinerja LU Pertambangan meningkat didorong Balinusra dan Kalimantan. Peningkatan kinerja LU Pertambangan di Balinusra terutama dipengaruhi oleh kenaikan produksi dan kualitas konsentrat tembaga. Perbaikan itu juga turut didukung oleh kenaikan harga (Grafik I.5). Di Kalimantan, kinerja LU Pertambangan menguat seiring kenaikan permintaan ekspor batu bara ke Tiongkok. Permintaan batu bara Tiongkok meningkat terutama bersumber dari kebutuhan PLTU, di tengah penurunan pasokan listrik dari PLTA akibat musim kemarau di negara tersebut. Di sisi lain, pertumbuhan LU Pertambangan Sumatera dan Sulampua tertahan akibat kendala produksi batu bara di Sumatera, serta bencana longsor yang memengaruhi produksi tembaga di Papua.



Sumber: Kementerian ESDM, diolah

Grafik I.5. Harga Acuan Komoditas Tambang Nasional



Sumber: Bea Cukai, diolah

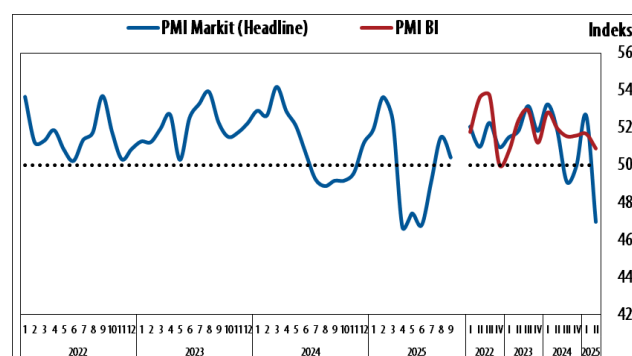
Grafik I.6. Nilai Ekspor Pertambangan Wilayah

Prospek LU Pertambangan pada tahun 2025 diperkirakan tetap tumbuh positif. Prospek positif LU Pertambangan terutama ditopang peningkatan *lifting* minyak dan gas Sumatera, sejalan dengan operasionalisasi kilang minyak baru di Kepri dan beroperasinya *hauling road* di Jambi. Di sisi lain, LU Pertambangan Balinusra tertahan oleh penurunan produksi dan kendala perizinan ekspor konsentrat tembaga, di tengah peningkatan kapasitas *smelter* yang baru optimal pada akhir tahun. Di Kalimantan, produksi batu bara diperkirakan tertahan akibat curah hujan

tinggi serta permintaan Tiongkok dan India yang lebih terbatas. Penurunan LU Pertambangan Kalimantan lebih dalam tertahan oleh produksi bauksit yang diperkirakan menguat sejalan dengan penambahan kapasitas *smelter*. Di Sulampua, produksi tembaga menurun akibat kendala izin ekspor di awal tahun. Perlambatan lebih dalam LU pertambangan Sulampua tertahan oleh aktivitas pertambangan nikel.

LU Industri Pengolahan

Kinerja LU Industri Pengolahan diperkirakan tetap kuat pada triwulan III 2025. Peningkatan kinerja LU Industri Pengolahan terindikasi dari realisasi *Purchasing Manager Index* (PMI) triwulan III 2025 yang meningkat dan berada pada fase ekspansif (Grafik I.7). Secara spasial, peningkatan kinerja LU Industri Pengolahan terutama ditopang wilayah Sumatera dan Jawa. Kinerja industri Sumatera didorong peningkatan produksi CPO untuk memenuhi permintaan domestik seiring implementasi B40, serta ekspor ke India menjelang periode Diwali (Grafik I.8). Peningkatan kinerja industri Jawa didorong industri makanan dan minuman. Hal ini seiring antisipasi kenaikan produksi untuk memenuhi peningkatan permintaan domestik menjelang HBKN Natal dan Tahun baru 2025. Selain itu, perbaikan kinerja industri tekstil dan produk tekstil (TPT) berorientasi ekspor juga mendukung peningkatan LU Industri di Jawa. Kinerja industri Balinusra dan Sulampua diperkirakan melambat akibat kendala produksi *smelter* tembaga di NTB dan normalisasi produksi *Liquified Natural Gas* (LNG) di Papua Barat. Di Kalimantan, kinerja LU Industri Pengolahan pada triwulan III 2025 diperkirakan tumbuh kuat didukung beroperasinya fasilitas pengolahan alumina baru di Kalimantan Barat, meski melambat akibat kendala produksi industri berbasis perkebunan.

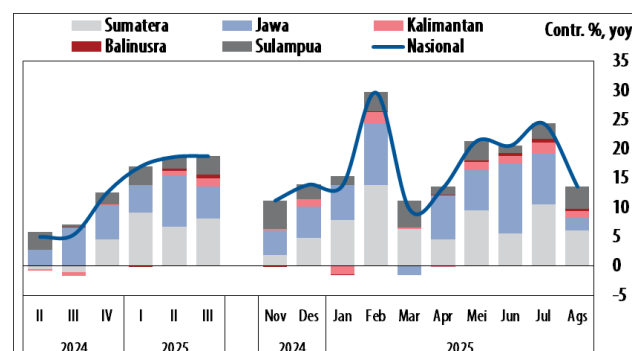


Sumber: Bea Cukai, diolah

Grafik I.7. Purchasing Manager Index (PMI)

Kinerja LU Industri Pengolahan pada 2025 diperkirakan meningkat didukung kinerja industri hilirisasi mineral. LU Industri Pengolahan Sulampua diperkirakan masih tumbuh kuat didorong industri hilirisasi nikel di Sulawesi

Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara. Kesuksesan kebijakan hilirisasi nikel di wilayah tersebut dalam menopang pertumbuhan ekonomi saat pandemi turut memicu perluasan hilirisasi ke komoditas pertambangan utama lainnya, khususnya alumina dan tembaga. Perkembangan pesat industri hilirisasi kedua komoditas tersebut diperkirakan menopang kinerja LU Industri Pengolahan di Kalimantan dan Balinusra. Mulai beroperasinya fasilitas pengolahan baru alumina di Kalimantan diperkirakan mendorong kinerja LU Industri Pengolahan Kalimantan meningkat tinggi pada 2025. Di Balinusra, beroperasinya *smelter* tembaga baru di NTB pada awal tahun 2025 diperkirakan akan mendorong peningkatan produksi secara gradual sepanjang tahun 2025. Di Sumatera dan Jawa, prospek kinerja LU Industri Pengolahan diperkirakan lebih ditopang permintaan domestik. Industri CPO di Sumatera diperkirakan akan tumbuh kuat untuk memenuhi permintaan biodiesel dari dalam negeri. Di Jawa, berbagai program pemerintah terkait ketahanan pangan diperkirakan berampak positif terhadap kinerja industri makanan dan minuman. Penambahan kapasitas industri di KI juga turut menopang perbaikan industri di Jawa.



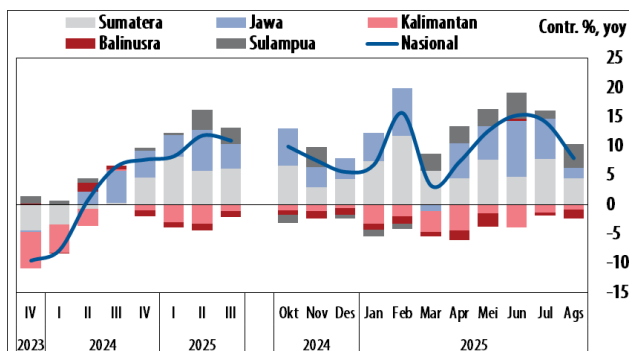
Sumber: Bea Cukai, diolah

Grafik I.8. Nilai Ekspor Industri Pengolahan Wilayah

LU Perdagangan

Kinerja LU Perdagangan triwulan III 2025 tetap kuat terutama di Sumatera. Kinerja LU Perdagangan diperkirakan ditopang Sumatera seiring penjualan eceran yang masih kuat serta perbaikan ekspor komoditas CPO dan *pulp and paper*. Di Jawa dan Balinusra, kinerja LU Perdagangan diperkirakan tertahan khususnya untuk barang tahan lama, dan kinerja ekspor yang terbatas (Grafik I.9). Kinerja LU Perdagangan Kalimantan dan Sulampua juga diperkirakan terbatas tecermin dari normalisasi penjualan barang eceran setelah berlalunya *festive season* pada triwulan sebelumnya. Kinerja perdagangan luar negeri menjadi penopang kinerja LU Perdagangan, terutama di Jawa, Sumatera, dan Sulampua, di tengah terbatasnya penjualan ritel domestik.

Pada keseluruhan 2025, kinerja LU Perdagangan diprakirakan meningkat ditopang Sumatera, Balinusra, dan Kalimantan. Perbaikan di Sumatera didorong oleh penguatan ekspor terutama minyak sawit, timah, dan batu bara. Di Balinusra, kinerja LU Perdagangan yang positif didorong peningkatan perdagangan komoditas pangan. Lebih lanjut, LU Perdagangan di Kalimantan turut meningkat didorong oleh beberapa *event* besar di Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan, serta terjaganya pendapatan masyarakat. Sementara itu, kinerja LU Perdagangan di Jawa dan Sulampua diprakirakan relatif lebih terbatas akibat prospek perdagangan ritel domestik yang belum kuat.



Sumber: Bea Cukai, diolah

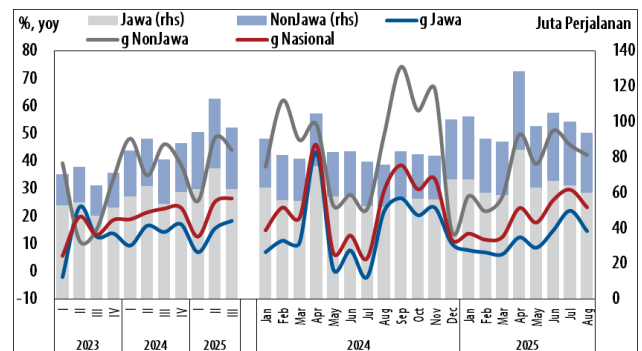
Grafik I.9. Nilai Ekspor Luar Negeri Non Migas per Wilayah

LU Penyediaan Akomodasi & Makanan dan Minuman (Akmamin)

Kinerja LU Akmamin pada triwulan III 2025 diprakirakan tetap terjaga, terutama ditopang Sumatera. Peningkatan mobilitas wisatawan nusantara dan mancanegara serta berbagai *event* besar Festival Budaya mendorong kinerja LU Akmamin di Sumatera. Di wilayah lainnya, peningkatan aktivitas masyarakat pada periode *festive* dan HBKN serta dampak pelonggaran efisiensi anggaran untuk perjalanan dinas dan MICE pemerintah mendorong LU Akmamin tetap tumbuh tinggi. Peningkatan mobilitas masyarakat pada periode *festive* tecermin dari jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) yang meningkat pada bulan Juli (Grafik I.10). Selain itu, kebijakan insentif diskon tarif angkutan selama periode libur sekolah, turut mendukung peningkatan mobilitas.

Kinerja LU Akmamin pada 2025 diprakirakan tetap kuat. Wilayah Balinusra dan Jawa sebagai pintu masuk utama wisatawan mancanegara (wisman) nasional diprakirakan menopang kinerja LU Akmamin untuk keseluruhan 2025. Selain itu, peningkatan aktivitas MICE swasta dan pemerintah pada semester II seiring kebijakan relaksasi perjalanan dinas turut menopang kinerja LU Akmamin di kedua wilayah. Lebih lanjut, kebijakan pemerintah,

antara lain kemudahan visa bagi kunjungan wisman di Kepulauan Riau melalui Singapura dan penambahan penerbangan internasional di beberapa daerah juga menjaga kinerja LU Akmamin tetap tinggi pada 2025.



Sumber: BPS, diolah

Ket.: Data triwulanan jumlah wisnus merupakan rerata triwulanan tsb.

Grafik I.10. Pergerakan Wisnus Berdasarkan Mobile Positioning Data

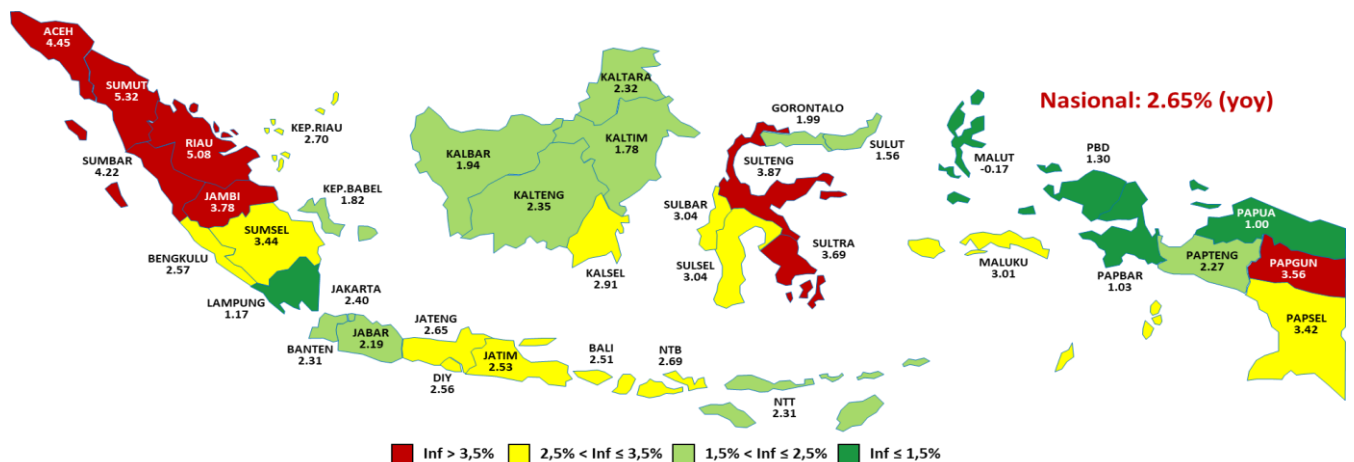
LU Konstruksi

Kinerja LU Konstruksi pada triwulan III 2025 diprakirakan meningkat di mayoritas wilayah. Perbaikan kinerja LU Konstruksi didorong realisasi proyek Pemerintah yang sebelumnya tertunda akibat kebijakan efisiensi anggaran. Di Sumatera, akselerasi proyek Pemerintah antara lain mencakup program perumahan rakyat dan berlanjutnya PSN di Sumatera bagian selatan. Sementara itu, konstruksi berbagai PSN dan proyek swasta di Jawa dan Balinusra juga terus berlanjut. Di Kalimantan, kinerja LU Konstruksi ditopang oleh berlanjutnya pembangunan IKN pascapembukaan blokir anggaran dan proyek industri kimia. Sementara itu, kinerja LU konstruksi di Sulampua sedikit tertahan seiring beberapa proyek swasta yang telah memasuki tahap akhir.

Secara keseluruhan tahun 2025, LU Konstruksi diprakirakan tetap tumbuh positif, ditopang perbaikan di Sulampua dan Balinusra. Dimulainya konstruksi proyek swasta di sektor mineral dan gas di Sulampua menopang prospek kinerja LU Konstruksi di wilayah tersebut pada tahun 2025. Di Balinusra, kinerja LU Konstruksi didukung pembangunan proyek strategis bernilai besar, seperti PSN Pengambengan dan KEK Kura-Kura. Sementara itu, penurunan pagu anggaran IKN berdampak cukup besar pada kinerja LU Konstruksi di Kalimantan secara keseluruhan tahun. Di Sumatera dan Jawa, LU Konstruksi juga tertahan akibat realokasi anggaran Pemerintah ke program prioritas terutama pada semester I 2025. Kinerja LU ini diprakirakan kembali terakselerasi pascapembukaan blokir anggaran pada semester II 2025.

BAGIAN 2

Perkembangan Terkini dan Prospek Inflasi Daerah



Sumber: BPS, diolah

Gambar II.1. Peta Inflasi IHK Berdasarkan Provinsi, Triwulan III 2025 (%yoy)

Inflasi IHK gabungan kota di seluruh wilayah pada triwulan III 2025 tetap terkendali. Secara nasional, inflasi IHK pada triwulan III 2025 sebesar 2,65% (yoy) meningkat dibandingkan realisasi triwulan II 2025, namun masih dibawah pola historis 3 tahun terakhir. Inflasi kelompok inti terkendali didukung konsistensi kebijakan Bank Indonesia dan normalisasi permintaan pascaHBKN. Peningkatan tekanan inflasi terutama dipengaruhi oleh kelompok *volatile food* (VF), khususnya cabai merah. Peningkatan juga terjadi pada kelompok AP akibat kenaikan harga rokok dan tarif air minum. Berdasarkan provinsi, inflasi IHK tertinggi di Sumatera Utara dan terendah di Maluku Utara (Gambar II.1).

Inflasi inti triwulan III 2025 terjaga pada level yang rendah di seluruh wilayah. Dari sisi domestik, tekanan inflasi inti menurun sejalan dengan konsistensi kebijakan Bank Indonesia, serta normalisasi permintaan pascaHBKN Idul Fitri dan Idul Adha pada semester I 2025. Tekanan inflasi inti terutama dari sisi eksternal akibat kenaikan harga emas global yang terjadi merata di seluruh wilayah, terutama di luar Jawa.

Inflasi kelompok VF meningkat di seluruh wilayah, tertinggi di Sumatera dan Sulampua. Peningkatan inflasi VF pada triwulan III didorong keterbatasan pasokan cabai merah dipengaruhi oleh kondisi cuaca yang kurang kondusif dan serangan hama di sentra produksi cabai merah di Sumatera Utara dan Bengkulu. Selain cabai merah, tekanan inflasi juga bersumber dari kenaikan harga daging ayam ras dipengaruhi oleh peningkatan biaya input produksi, khususnya jagung pakan. Di Sulampua, tekanan inflasi VF sepanjang 2025, juga

didorong kenaikan harga komoditas perikanan dipengaruhi cuaca yang mengganggu produksi ikan tangkap.

Inflasi kelompok AP meningkat di mayoritas wilayah. Tekanan AP pada triwulan III 2025 utamanya disumbang oleh inflasi komoditas rokok dan tarif air minum PAM. Harga Jual Eceran (HJE) rokok meningkat di seluruh wilayah, sementara tarif air minum PAM meningkat di beberapa provinsi di Kalimantan dan Jawa. Kenaikan inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh deflasi pada komponen angkutan seiring berbagai diskon tarif moda transportasi pada triwulan III 2025, dan berakhirnya musim liburan. Secara spasial, deflasi terdalam jasa angkutan penumpang terjadi di Papua Pegunungan, Papua, dan Maluku Utara.

Inflasi IHK 2025 di seluruh wilayah diperkirakan tetap berada pada rentang sasaran $2,5 \pm 1\%$. Terkendalinya inflasi dalam kisaran sasaran seiring konsistensi kebijakan moneter Bank Indonesia, ekspektasi inflasi, *imported inflation* yang terjaga, dampak rambatan VF yang terkendali, serta dampak positif dari digitalisasi. Pada kelompok VF, inflasi terjaga sesuai target di bawah 5% (yoy) didukung pasokan yang lebih baik di daerah sentra. Fokus upaya pengendalian inflasi pangan ditujukan untuk memastikan kelancaran distribusi dari daerah sentra ke non-sentra. Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan mitra strategis, termasuk melalui program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID).

"Halaman ini sengaja dikosongkan"

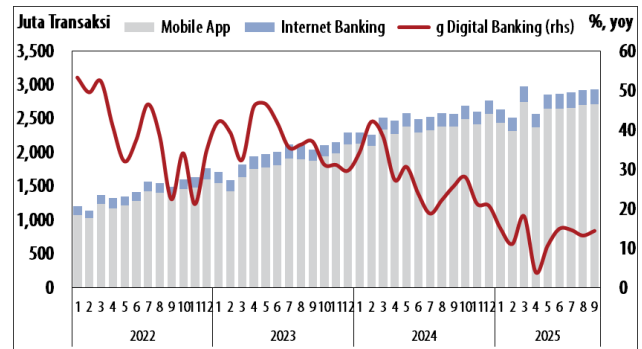
BAGIAN 3

Perkembangan Terkini Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Aktivitas ekonomi dan keuangan digital di Indonesia terus mencatatkan pertumbuhan positif. Hingga Agustus 2025, nilai transaksi pembayaran digital yang mencakup penggunaan aplikasi *mobile* dan *internet banking* meningkat sebesar 12,99% (yoy) (Grafik III.1). Sejalan dengan itu, volume transaksi uang elektronik juga tumbuh sebesar 44,29% (yoy), sementara transaksi kartu kredit meningkat 17,3% (yoy). Penggunaan QRIS juga terus tumbuh pesat, mendukung perluasan ekonomi dan keuangan digital. Jumlah *merchant* yang terdaftar telah mencapai 40,5 juta, sementara jumlah pengguna mencapai 57,6 juta. Sejalan perkembangan tersebut, volume transaksi QRIS tumbuh sangat tinggi sebesar 145,07% (yoy) (Grafik III.2). Peningkatan tersebut mencerminkan perluasan akseptansi QRIS, terutama di *merchant* UMKM, yang mendorong peningkatan efisiensi ekonomi melalui transaksi nontunai.

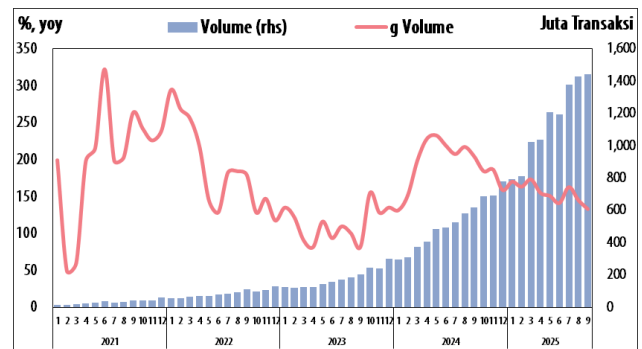
Transaksi Sistem Pembayaran Bank Indonesia (SPBI) dan jumlah uang yang diedarkan (UYD) tetap mencatatkan pertumbuhan positif. Dari sisi transaksi sistem pembayaran ritel khususnya BI-FAST, volume dan nilai transaksi masing-masing tumbuh sebesar 27,50% dan 17,83% (yoy), relatif stabil dibandingkan triwulan sebelumnya. Pola serupa juga terlihat pada peredaran uang, di mana jumlah UYD pada Agustus 2025 tumbuh sebesar 12,14% (yoy), lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh 9,68% (yoy). Kondisi ini

mencerminkan tetap terjaganya aktivitas ekonomi masyarakat meskipun periode libur sekolah dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) telah berakhir.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik III.1. Transaksi Nominal Digital Payments



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik III.2. Volume dan Pertumbuhan Volume Transaksi QRIS

"Halaman ini sengaja dikosongkan"

BAGIAN 4

Isu Strategis: Penguatan Ekosistem dan Perluasan Akseptasi Pembayaran Digital Untuk Mendukung Pertumbuhan Sektor Prioritas dan Program Pemerintah

Pendahuluan

Penguatan ekosistem dan perluasan akseptasi pembayaran digital merupakan kunci untuk mendorong Ekonomi dan Keuangan Digital (EKD). Upaya dimaksud sejalan dengan arah inisiatif *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030. Penguatan EKD memegang peranan penting dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% pada tahun 2029 sebagai wujud implementasi Asta Cita #3, #6, dan #7 yang menekankan peningkatan produktivitas, efisiensi fiskal, dan transformasi digital lintas sektor. Di tengah risiko perlambatan ekonomi akibat faktor global seperti ketegangan geopolitik, perubahan arah kebijakan ekonomi Amerika Serikat pasca *Trump's Effect*, serta disrupsi inovasi teknologi, Indonesia juga menghadapi tantangan domestik berupa kebijakan fiskal ketat, pelemahan daya beli masyarakat, dan fragmentasi demografi yang berpotensi menahan momentum pertumbuhan.

Bank Indonesia melalui kebijakan penguatan ekosistem dan perluasan akseptasi pembayaran digital mendukung berbagai implementasi program pemerintah. Beberapa program utama yang menjadi fokus dukungan yakni Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT), Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), digitalisasi sektor transportasi, serta sektor pariwisata sebagai sektor prioritas. Dalam kerangka ini, asesmen dilakukan melalui pendekatan *supply-demand* sistem pembayaran secara spasial. Pada sisi *supply*, asesmen diarahkan pada ketersediaan dan penguatan infrastruktur pembayaran digital beserta inovasi layanan yang dilakukan di daerah. Pada sisi *demand*, asesmen dilakukan terhadap tingkat literasi, adopsi, dan akseptasi masyarakat yang berpotensi untuk meningkatkan akseptasi pembayaran digital di daerah.

Hasil asesmen *supply-demand* memberikan gambaran divergensi kesiapan infrastruktur dan tingkat adopsi pembayaran digital antar daerah. Dengan pertimbangan tersebut, respon kebijakan perlu dilakukan melalui pendekatan yang adaptif dan kontekstual sesuai karakteristik wilayah mengacu pada kesiapan

infrastruktur dan tingkat adopsi pembayaran digital pada program BSNT, ETPD, digitalisasi sektor transportasi, dan sektor pariwisata. Upaya dimaksud diharapkan dapat memperluas ekosistem pembayaran digital yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh daerah.

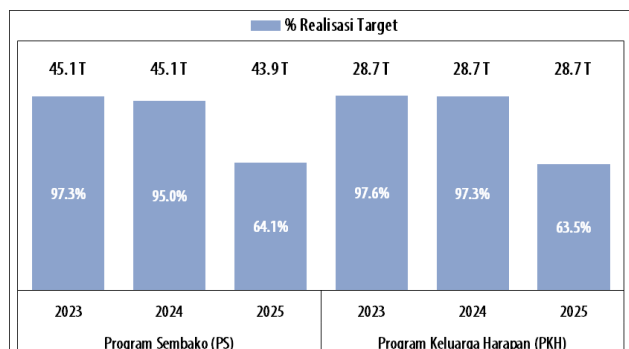
Asesmen *Supply-Demand* Ekosistem dan Perluasan Akseptasi Pembayaran Digital pada Program Pemerintah dan Sektor Prioritas

Program Pemerintah: BSNT

Implementasi program bantuan sosial (bansos) terus didorong ke arah nontunai. Hingga triwulan III 2025, realisasi penyaluran bansos untuk Program Sembako mencapai 64,1% dari total target sebesar Rp43,9 triliun dan Program Keluarga Harapan mencapai 63,5% dari total target Rp28,7 triliun (Grafik IV.1). Dari jumlah realisasi pada masing-masing program tersebut, alokasi penyaluran secara nontunai dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) telah mencapai lebih dari 90% (Grafik IV.2). Hal ini menunjukkan komitmen Tim Pengendali BSNT untuk terus mendorong penyaluran bansos nontunai sejalan dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

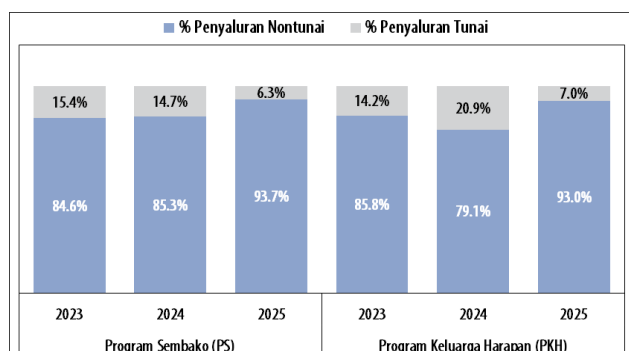
Implementasi penyaluran BSNT memerlukan penguatan aksesibilitas layanan SP (*supply*) maupun literasi masyarakat (*demand*). Dari sisi *supply*, aksesibilitas layanan SP yang terdiri dari mesin ATM, Kantor Cabang bank, serta agen bank (Laku Pandai dan Layanan Keuangan Digital/LKD) belum merata di seluruh wilayah. Di antara layanan SP tersebut, agen bank memiliki peran paling strategis karena jangkauannya yang luas dan paling dekat dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Oleh karena itu, ketersediaannya perlu terus didorong terutama di wilayah Sulampua, Sumatera, dan Kalimantan yang masih memiliki keterbatasan akses layanan keuangan. Dari sisi *demand*, literasi KPM perlu terus diperkuat terutama di wilayah Balinusra. Selain itu, pemanfaatan dana bantuan secara nontunai juga perlu didorong untuk mendukung

terbentuknya ekosistem digital yang menyeluruh. Dalam hal ini, optimalisasi peran tenaga pendamping di setiap daerah menjadi penting untuk memastikan proses edukasi dan pendampingan yang berkelanjutan, khususnya terkait aspek literasi seperti manfaat transaksi secara nontunai, penggunaan dan keamanan PIN KKS, tata cara pengaduan masalah, serta cara pemanfaatan dana bantuan secara bijak.



Sumber: Bank Indonesia 2025, diolah

Grafik IV.1. Realisasi dan Target Penyaluran PS dan PKH



Sumber: Bank Indonesia 2025, diolah

Grafik IV.2. Proporsi Penyaluran PS dan PKH secara Tunai dan Nontunai

Untuk mewujudkan penyaluran bansos yang tepat sasaran dan *customer centric*, Pemerintah tengah mengembangkan digitalisasi bansos sebagai bagian dari inisiatif *Digital Public Infrastructure (DPI)*. Berdasarkan laman resmi Kementerian Sosial (Kemensos), digitalisasi bansos merupakan langkah awal implementasi Perpres Nomor 83 Tahun 2025 tentang Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, yang akan dikolaborasikan bersama sejumlah Kementerian/Lembaga (K/L) terkait untuk memastikan integrasi data, pemanfaatan teknologi, dan tata kelola yang transparan serta akuntabel. Pada tahap awal, digitalisasi bansos tengah diujicobakan kepada masyarakat di Kabupaten Banyuwangi. Uji coba tersebut dilakukan melalui mekanisme registrasi mandiri, yakni masyarakat melakukan pendaftaran secara mandiri pada aplikasi Perlinsos yang kemudian akan dinilai pemenuhan persyaratannya pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSN). Mekanisme ini

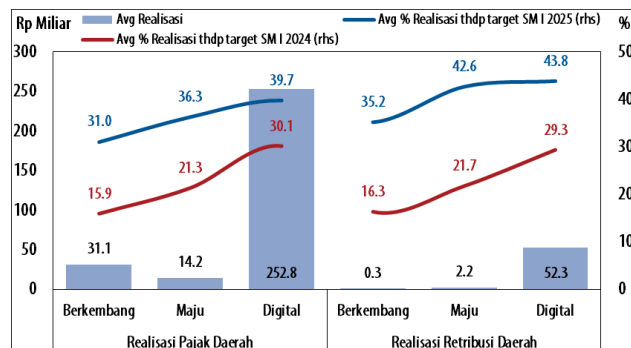
memberikan keleluasaan bagi calon KPM untuk dapat mengisi persyaratan sesuai kondisi riil, termasuk opsi rekening yang akan didaftarkan (*customer centric*). Untuk mendukung inisiatif transformasi digitalisasi bansos ke depan, Bank Indonesia sebagai anggota Tim Pengendali BSNT memberikan dukungannya melalui i) memastikan kelancaran infrastruktur SP, ii) memastikan model bisnis sesuai ketentuan yang berlaku, iii) memastikan kesiapan ekosistem SP dengan berkoordinasi bersama Penyedia Jasa Sistem Pembayaran (PJP) terutama terkait kesiapan layanan SP seperti *merchant*, agen LKD, mesin ATM, dan lain sebagainya, serta iv) mendukung penyediaan transaksi pembayaran dari PJP tempat rekening KPM ditatausakan.

Program Pemerintah: ETPD

Implementasi ETPD terus terakselerasi dan berperan dalam optimalisasi pendapatan maupun serapan belanja di daerah. Tingkat elektronifikasi yang diukur dari survei Indeks ETPD mencatat sebanyak 501 pemerintah daerah (91,8% Pemda) telah berada pada tahap digital pada semester I 2025. Capaian ini mencerminkan komitmen kuat Pemda dalam mengoptimalkan transaksi nontunai guna meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Secara spasial, seluruh Pemda di Jawa telah berstatus digital, sedangkan Pemda di tahap berkembang dan maju terkonsentrasi di wilayah Sulampua dan akan menjadi fokus percepatan ke depan. Secara umum, Pemda pada tahap digital mencatatkan realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) (Grafik IV.3) dan serapan belanja (Grafik IV.4) yang lebih optimal dibandingkan Pemda di tahap maju dan berkembang, menegaskan pentingnya elektronifikasi dalam memperkuat efektivitas fiskal daerah.

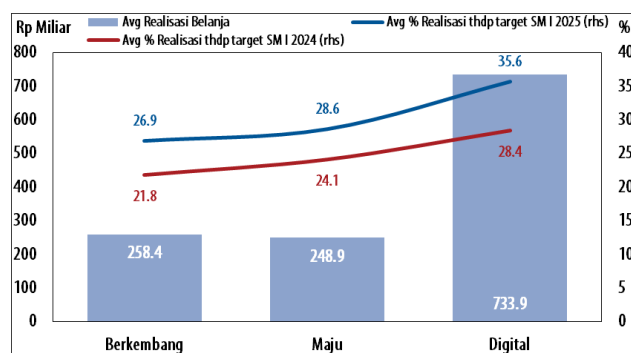
Penyediaan kanal pembayaran nontunai oleh Pemda terus meningkat, baik dari sisi jumlah maupun variasi instrumen. Secara nasional, 94,7% Pemda telah menyediakan kanal pembayaran konvensional (*teller* dan agen) untuk pembayaran berbagai jenis PDRD. Sementara itu, kanal nondigital (kartu ATM, UE, EDC) tersedia di 79,7% Pemda dan kanal digital (*e-banking*, QRIS, dan *e-commerce*) tersedia di 87,8% Pemda (Gambar IV.1). Peningkatan ketersediaan kanal pembayaran PDRD berbasis digital terjadi di berbagai wilayah, dengan *e-banking* dan QRIS sebagai kanal dominan. Meski demikian, ketersediaan kanal digital di wilayah Sulampua belum optimal akibat keterbatasan infrastruktur telekomunikasi dan perbankan. Hasil uji empiris menunjukkan bahwa peningkatan variasi kanal

pembayaran dan transaksi melalui kanal nontunai berkontribusi positif terhadap optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan dampak ketersediaan kanal paling berpengaruh di wilayah Balinusra dan Sulampua. Hal tersebut menegaskan pentingnya perluasan kanal nontunai di daerah dengan infrastruktur terbatas.



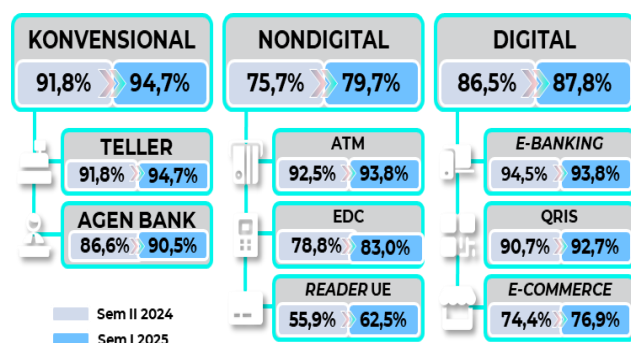
Sumber: Bank Indonesia 2025, diolah

Grafik IV.3. Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah sesuai Tahapan Digitalisasi Pemda



Sumber: Bank Indonesia 2025, diolah

Grafik IV.4. Realisasi Belanja Daerah sesuai Tahapan Digitalisasi Pemda

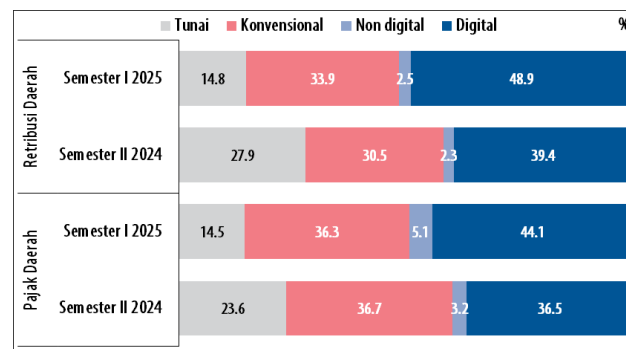


Sumber: Bank Indonesia 2025, diolah

Gambar IV.1. Penyediaan Kanal Pembayaran PDRD

Realisasi penerimaan daerah menunjukkan pergeseran menuju kanal digital. Pangsa penerimaan PDRD melalui kanal digital mencapai 44,1% untuk pajak dan 48,9% untuk retribusi. Pangsa pembayaran PDRD secara tunai semakin menurun yang mengindikasikan semakin baiknya adopsi masyarakat terhadap pembayaran nontunai. Secara spasial, wilayah Kalimantan mencatatkan pangsa tertinggi pembayaran PDRD

melalui kanal digital, sementara wilayah Sumatera masih didominasi kanal konvensional (Grafik IV.5). Penguatan adopsi pembayaran digital akan terus didorong melalui penguatan literasi dan keamanan digital bagi masyarakat.



Sumber: Bank Indonesia 2025, diolah

Grafik IV.5. Proporsi Realisasi PDRD berdasarkan Kanal Pembayaran

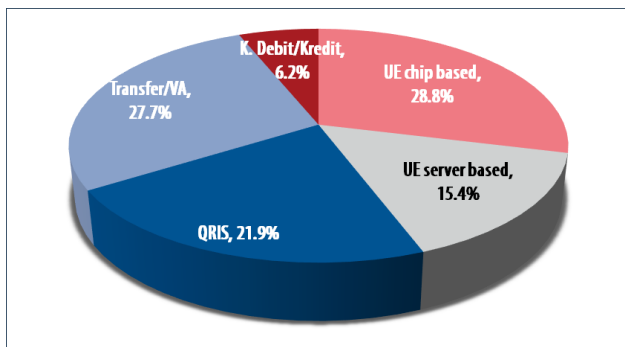
Mayoritas realisasi anggaran belanja Pemda telah dibayarkan secara nontunai. Hal ini sejalan dengan implementasi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya pada belanja barang dan jasa serta barang modal melalui mekanisme Uang Persediaan (UP), penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen pemerintah terus diperkuat. Hingga triwulan III – 2025, 477 Pemda (87%) telah memiliki Peraturan Kepala Daerah (Perkada) KKI sebagai landasan hukum implementasi KKI segmen pemerintah yang didukung oleh layanan KKI seluruh BPD. Namun demikian, pemanfaatan KKI segmen pemerintah belum optimal yang saat ini baru digunakan oleh 238 Pemda (43,6%), dengan pemanfaatan utama untuk pembelian perlengkapan kantor, pembayaran transportasi perjalanan dinas, dan konsumsi rapat. Pemanfaatan KKI segmen pemerintah akan terus didorong melalui penguatan ekosistem pemanfaatan, antara lain melalui perluasan *merchant* dan akseptasi pada *platform* pengadaan pemerintah.

Ke depan, penguatan implementasi ETPD difokuskan pada peningkatan peran BPD dan penguatan kapasitas Pemda. Bank Indonesia bersama Satgas P2DD melanjutkan program percepatan integrasi Standar Nasional *Open API* Pembayaran (SNAP) pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) untuk memastikan konektivitas penuh sistem keuangan daerah dengan BPD. Bank Indonesia juga mendorong penguatan BPD dalam penyediaan berbagai layanan pembayaran bagi Pemda, baik secara mandiri maupun melalui kerja sama

dengan PJP dan mitra lainnya. Selain itu, akan diluncurkan program Peningkatan Kapasitas dan Literasi Sinergi P2DD atau KATALIS P2DD sebagai wadah pembelajaran bersama dan sinergi antar TP2DD secara triwulanan. Program ini ditujukan untuk memperkuat kompetensi SDM dan memperkecil kesenjangan digital antar daerah sehingga implementasi ETPD dapat semakin inklusif, efisien, dan berkelanjutan dalam mendukung transparansi pengelolaan keuangan publik dan optimalisasi penerimaan daerah.

Program Pemerintah: Digitalisasi Sektor Transportasi

Implementasi digitalisasi sektor transportasi terus diperluas melalui penyediaan berbagai kanal dan instrumen pembayaran nontunai. Secara umum, penggunaan kanal atau instrumen pembayaran nontunai sektor transportasi masih didominasi UE *chip-based* (29%), diikuti oleh pembayaran berbasis transfer / *Virtual Account* (VA) (28%), dan QRIS (22%) (Grafik IV.6). Keragaman pilihan pembayaran tersebut telah tersedia di seluruh moda transportasi, mulai dari moda transportasi darat (termasuk rel) a.l. bus (dalam program *Buy The Service*/BTS), DAMRI, MRT, LRT, dan KRL, moda transportasi penyeberangan a.l. layanan penyebrangan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP), serta perparkiran a.l. layanan parkir *on-street* yang dikelola Dinas Perhubungan Pemda dan parkir bandara yang dikelola Angkasa Pura Indonesia.



Sumber: Bank Indonesia 2024, diolah

Grafik IV.6. Ketersediaan metode pembayaran sektor transportasi

Perluasan digitalisasi sektor transportasi memerlukan penguatan dari sisi ketersediaan kanal pembayaran digital (*supply*) maupun penggunaan pembayaran digital (*demand*). Dari sisi *supply*, ketersediaan pembayaran digital melalui QRIS pada moda transportasi masih terkonsentrasi di wilayah Jawa dan Sumatera. Di wilayah lainnya, implementasi belum optimal karena sejumlah kendala, di antaranya terbatasnya moda transportasi umum, belum meratanya infrastruktur jaringan sinyal,

dan biaya perangkat pendukung seperti mesin EDC yang dinilai cukup mahal oleh operator moda. Dari sisi *demand*, penggunaan pembayaran digital di sektor transportasi juga masih terpusat di wilayah Jawa. Kondisi ini disebabkan oleh keterbatasan moda yang mendukung opsi pembayaran digital di luar Jawa sehingga pemanfaatan QRIS di wilayah lain belum optimal.

Pemerintah terus mendorong digitalisasi transportasi melalui inisiatif pengembangan integrasi moda dan perluasan pembangunan moda transportasi perkotaan.

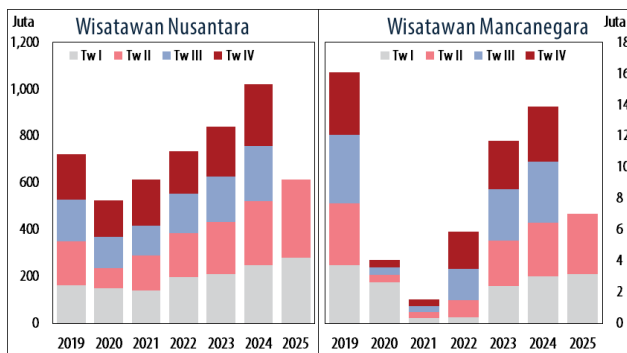
Pada inisiatif integrasi moda transportasi, fokus kebijakan diarahkan pada konektivitas antar moda transportasi, seperti stasiun, pelabuhan, dan kawasan berorientasi transit (*Transit Oriented Development*/TOD) yang mengintegrasikan sistem transportasi publik dengan area hunian, bisnis, dan fasilitas publik di sekitarnya. Untuk mendukung inisiatif ini diperlukan integrasi pembayaran melalui integrasi tarif dan sistem tiket. Sementara itu, inisiatif pembangunan transportasi perkotaan terus didukung dengan perluasan layanan BTS di berbagai daerah. Program ini menyediakan opsi pembayaran nontunai/digital, seperti UE *chip-based* dan QRIS, yang saat ini telah beroperasi di Medan, Palembang, Bandung, Surakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado.

Bank Indonesia mendukung digitalisasi pembayaran transportasi melalui perluasan instrumen dan kanal pembayaran, salah satunya melalui inovasi QRIS Tanpa Perantara (QRIS TAP) yang menjadi *game changer* pembayaran di sektor transportasi. QRIS TAP telah diimplementasikan sejak diluncurkan pada tanggal 14 Maret 2025 dan kini telah diperluas di berbagai daerah, di antaranya DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bali, dan lainnya.

Sektor Prioritas: Pariwisata

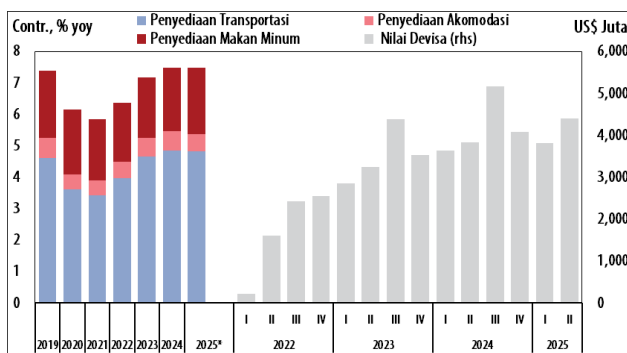
Pengembangan sektor pariwisata difokuskan pada Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Secara nasional, kinerja pariwisata terus menunjukkan pemulihan, mendekati kondisi sebelum pandemi COVID-19. Pertumbuhan ini terlihat dari peningkatan jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara (Grafik IV.7), kontribusi PDRB sektor terkait pariwisata, dan kenaikan devisa pariwisata (Grafik IV.8). Hingga Juni 2025, kontribusi PDRB sektor pariwisata didominasi oleh penyediaan transportasi,

diikuti oleh penyediaan makan dan minum sebagai komponen utama pendukung aktivitas wisata.



Sumber: BPS, diolah

Grafik IV.7. Jumlah Wisatawan Nusantara dan Mancanegara



Sumber: BPS dan Bank Indonesia, diolah

Grafik IV.8. Share Kontribusi PDRB Pariwisata dan Perkembangan Devisa Pariwisata

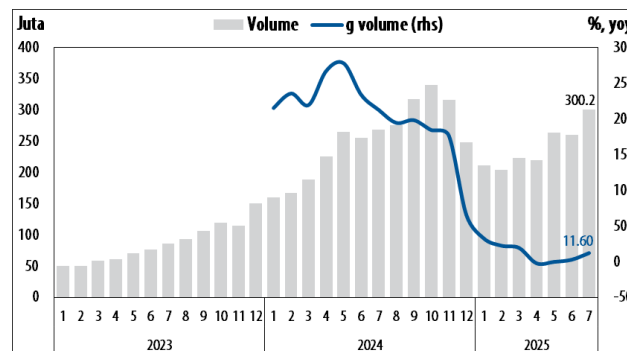
Ketersediaan pembayaran digital pada wilayah DPSP perlu terus diperluas, terutama di destinasi Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Berbagai opsi kanal pembayaran nontunai pada transportasi darat, rel, dan penyeberangan menuju lima DPSP telah tersedia dengan beragam instrumen, seperti UE *chip-based*, QRIS, kartu debit/kredit, dan transfer/*virtual* account, meskipun ketersediaannya di Labuan Bajo masih terbatas (Tabel IV.1). Selain itu, di area destinasi tersebut juga telah tersedia infrastruktur sistem pembayaran dan berbagai kanal pembayaran nontunai a.l. ATM, UE *reader*, EDC, dan *merchant* QRIS wisata yang mendukung perluasan ekosistem pembayaran digital di kawasan wisata.

Tabel IV.1. Ketersediaan Kanal Pembayaran Nontunai

Destinasi	Subsektor	Opsi Pembayaran NonTunai			
		UE CB	QRIS	Trf/VA	Debit/KK
Danau Toba	Darat	✓	✓	✓	✓
	Rel	✓	✓	✓	✓
	Penyeberangan	✓		✓	
Borobudur	Darat	✓	✓		✓
	Rel	✓	✓	✓	
Mandalika	Darat	✓	✓	✓	✓
Labuan Bajo	Penyeberangan	✓			
Likupang	Darat		✓	✓	

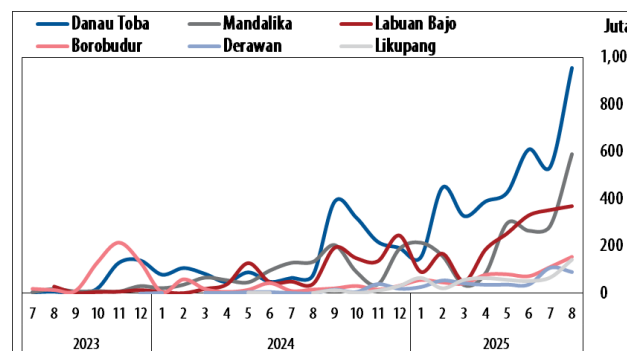
Sumber: Bank Indonesia 2024, diolah

Transaksi QRIS sektor pariwisata masih melanjutkan tren pertumbuhan (Grafik IV.9) dengan cakupan aktivitas pariwisata yang didominasi oleh pembelian makan dan minum serta perdagangan ritel. Transaksi QRIS *cross border* di DPSP juga terus bertumbuh, terutama di daerah Danau Toba (Grafik IV.10). Namun demikian, QRIS *cross border* masih dapat dioptimalkan, terutama untuk wisatawan asal Malaysia dan Singapura yang masih menunjukkan transaksi penukaran uang tunai yang cukup tinggi.



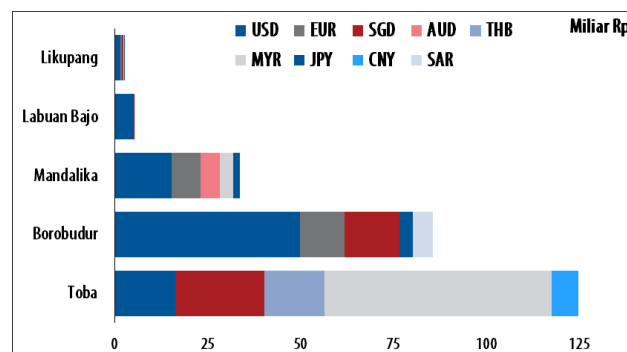
Sumber: ASPI & PTEN, diolah

Grafik IV.9. Volume Transaksi QRIS Pariwisata Nasional



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik IV.10. Tren Volume QRIS *Cross Border* (Inbound) Pariwisata di 5 DPSP



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik IV.11. *Share* Transaksi KUPVA BB berdasarkan Mata Uang di 5 DPSP

Pemerintah telah memiliki inisiatif dan strategi untuk mendorong kinerja pariwisata, salah satunya pengembangan *Tourism* 5.0: AI & Digitalisasi untuk pemasaran yang lebih kuat dan berkualitas. Hal tersebut

diwujudkan melalui digitalisasi layanan pariwisata mencakup perencanaan (*planning*), transportasi, akomodasi, dan eksekusi dengan dukungan *enabler* data, kemampuan SDM, *platform* pariwisata, serta infrastruktur layanan wisata, termasuk sistem pembayaran digital. Strategi utama yang dijalankan pemerintah meliputi pengembangan sistem manajemen destinasi wisata serta pengembangan AI *travel assistance* dan *command center*. Sistem pembayaran turut berperan penting dalam mendukung digitalisasi pariwisata melalui, i) perluasan dan akseptasi inovasi pembayaran digital yang terintegrasi di sektor pariwisata (a.l transportasi, akomodasi, eksekusi, dan UMKM pendukung pariwisata), ii) peningkatan penggunaan QR *cross border*, dan iii) akselerasi promosi atau *branding* pariwisata yang disinergikan dengan pelaksanaan kampanye akseptasi digital, seperti kampanye *flagship* QRIS Jelajah Budaya.

Upaya Akselerasi Peran Digitalisasi di Daerah

Beberapa *quick wins* akan terus dilakukan dan diperkuat di berbagai daerah meliputi:

- a) *Quick wins* program BSNT diarahkan pada peningkatan koordinasi dengan bank penyalur untuk memastikan ketersediaan dan kualitas layanan agen, serta edukasi berbasis komunitas kepada KPM dan agen bank.
- b) Pada program ETPD, *quick wins* mencakup koordinasi percepatan penyediaan infrastruktur jaringan terutama di wilayah 3T, perluasan pemanfaatan instrumen/kanal digital termasuk melalui *Championship* TP2DD dan implementasi KKI *online payment*, digitalisasi layanan sistem pembayaran oleh BPD melalui integrasi SNAP dan SIPD, edukasi kepada masyarakat, serta inisiasi KATALIS P2DD sebagai wadah pembelajaran dan evaluasi berkelanjutan.
- c) Pada sektor transportasi, *quick wins* difokuskan pada kerja sama operator dan PJP untuk memperluas opsi pembayaran digital, sosialisasi edukasi kepada masyarakat, dan pembentukan forum koordinasi nasional.
- d) Pada sektor prioritas pariwisata, *quick wins* diarahkan untuk mendorong perluasan dan akseptasi melalui inovasi pembayaran digital di sektor wisata, meningkatkan promosi pariwisata bersinergi dengan kampanye akseptasi digital, serta perluasan *merchant* dan akseptasi QRIS, termasuk QRIS *cross border*.

Kesiapan Infrastruktur dan Adopsi Pembayaran Digital Spasial

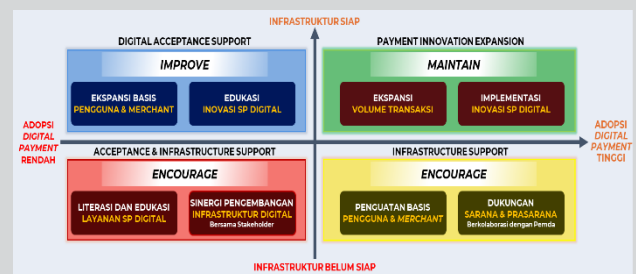
Strategi untuk mendorong EKD perlu mempertimbangkan karakteristik daerah. Hal ini karena setiap daerah menghadapi kondisi dan tantangan tersendiri. Ada yang memerlukan penguatan infrastruktur sistem pembayaran, ada yang memerlukan peningkatan literasi, dan ada pula yang sudah siap menerapkan percepatan inovasi. Karenanya, strategi digitalisasi juga tidak bersifat *one size fits all* yaitu harus disesuaikan dengan hasil pemetaan karakteristik dan kebutuhan per wilayah agar efektif dan tepat sasaran.

Pemetaan dilakukan dengan membandingkan tingkat kesiapan infrastruktur sistem pembayaran dengan tingkat adopsi pembayaran digital di masing-masing daerah. Kesiapan infrastruktur sistem pembayaran dilihat dari beberapa indikator, yaitu rasio penetrasi telepon genggam, rasio jumlah ATM dan EDC per populasi/panjang jalan, rasio jumlah *merchant* QRIS per kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB, dan persentase wilayah yang tersedia sinyal. Sementara itu, tingkat adopsi pembayaran digital sebagai *resultante* dari ketersediaan infrastruktur sistem pembayaran diukur melalui berbagai indikator rasio volume transaksi sistem pembayaran per pengguna, per luas wilayah, serta per PDRB.

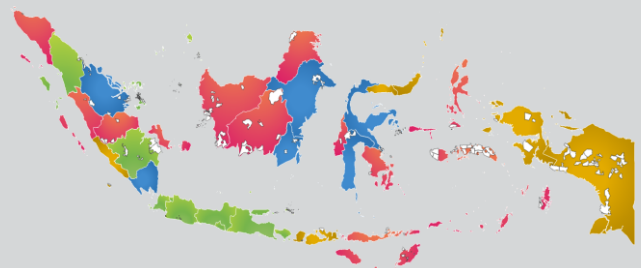
Hasil pemetaan kemudian dikelompokkan ke dalam empat kuadran (Gambar IV.2). Wilayah dengan infrastuktur siap dan adopsi pembayaran digital yang tinggi masuk ke dalam kuadran *payment innovation expansion* (hijau). Bagi wilayah dengan infrastruktur siap namun adopsi pembayaran digital masih rendah termasuk dalam kuadran *digital acceptance support* (biru). Sementara itu, wilayah dengan infrastruktur belum merata namun adopsi pembayaran digital relatif tinggi masuk ke dalam kuadran *infrastructure support* (kuning). Untuk wilayah dengan infrastruktur belum merata dan adopsi pembayaran digital rendah masuk dalam kuadran *acceptance & infrastructure support* (merah).

Hasil asesmen spasial menunjukkan adanya variasi pada kesiapan infrastruktur sistem pembayaran dan tingkat adopsi pembayaran digital antar wilayah di Indonesia (Gambar IV.3). Adanya kesenjangan antar wilayah ini menjadi dasar strategi spasial dengan tiga pendekatan. Pertama, **strategi encourage** yang diprioritaskan bagi

daerah kuning dan merah melalui penguatan basis pengguna & *merchant* melalui literasi serta dukungan sarana prasarana yang disertai sinergi lintas mitra dalam pengembangan infrastruktur. Kedua, bagi daerah biru diterapkan strategi *improve* melalui perluasan basis pengguna dan *merchant*, serta edukasi inovasi SP digital. Ketiga, strategi *maintain* melalui ekspansi transaksi dan implementasi inovasi SP digital bagi daerah berwarna hijau.



Gambar IV.2. Pemetaan Kesiapan Infrastruktur dan Adopsi Pembayaran Digital Spasial



Gambar IV.3. Sebaran Kesiapan Infrastruktur Digital dan Adopsi Pembayaran Digital di Indonesia

Sejalan dengan penjabaran pilar Inovasi dalam BSPI 2030, Bank Indonesia turut mendorong strategi digitalisasi spasial yang mengedepankan sinergi dan kolaborasi untuk perluasan pembayaran digital sesuai kesiapan daerah, antara lain:

- Strategi encourage** melalui pengenalan QRIS statis, KKI, dan BI-FAST, perluasan jaringan infrastruktur, serta edukasi literasi produk digital yang disinergikan dengan kampanye *flagship* QRIS Jelajah Indonesia, Gerakan Bangga Buatan Indonesia, dan Gerakan Bangga Wisata Indonesia.
- Strategi improve** diarahkan melalui strategi *encourage* beserta pengembangan instrumen QRIS dinamis, CPM, TAP, dan KKI *online*, peningkatan jumlah pengguna dan *merchant*, serta edukasi produk lanjutan.

c) Strategi *maintain* diterapkan melalui strategi *encourage, improve*, serta perluasan *use case* QRIS, pemanfaatan KKI *online*, pengembangan teknologi

biometrik, dan perluasan transaksi lintas sektor untuk memperkuat efisiensi ekosistem pembayaran digital.

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab

Firman Mochtar

Koordinator Penyusun

Tri Yanuarti

Tim Penulis

Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter
Grup Sektorial dan Regional

Maximilian Timothy Tutuarima
Archi Hilmardhany
Ide Mahendra
Ramdha Dien Azka
Viyasa Rahyaputra
Rasyid Ramadhan Samsuri
Archie Flora Anisa
Reffi Marizka Dewi
Muhammad Reihan Davie

Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran

Primitiva Febriarti
Gina Fithriana F. S.
Meita Elshinta Siagian
Pandu Anggara
Dinda Rahmania
Miftakhul Meiliana
Deby Awalya Bonita
Beryl Putra Sanjaya
Wanda Puspita Hati



JL. MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10350
www.bi.go.id